



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA
MATERI BAB VIII – PENGADAAN LAHAN**

TANGGAL 15 SEPTEMBER 2020

Tahun Sidang	: 2020– 2021
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 17 (tujuh belas)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 15 September 2020
P u k u l	: 15.40 WIB s/d 21.32 WIB
T e m p a t	: R. Rapat Baleg Gd. Nusantara I Lt. I
A c a r a	: Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab VIII-Pengadaan Lahan Pasal 120 s.d 139
Ketua Rapat	: Ach, Baidowi, Sos.(Wakil Ketua Baleg)
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - Secara fisik: 13 orang dan secara virtual 10 orang dari 40 orang Anggota Panja, dari 9 Fraksi - Secara fisik: 20 orang perwakilan Pemerintah beserta jajaran - Secara fisik: 1 orang dan secara virtual 6 orang perwakilan DPD RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Skorsing Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab VIII – Pengadaan Lahan Pasal 120 s.d. Pasal 139 dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Ach. Baidowi, S.Sos., dicabut pukul 15.40 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan meminta kepada Pemerintah untuk menyampaikan penjelasan terlebih dahulu terkait materi Bab VIII Pasal 120 s.d. Pasal 139 (Pengadaan Lahan) sebelum memulai pembahasan DIM RUU tersebut.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

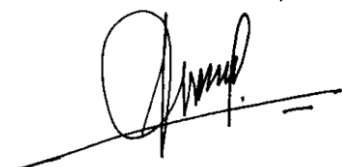
Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab VIII – Pengadaan Lahan Pasal 120 s.d. Pasal 139, menyepakati/menyetujui:

1. DIM Nomor 6461, 6462, 6463, 6464, 6465 disetujui untuk direformulasi rumusannya dan dibahas dalam Timus/Timsin.
2. DIM Nomor 6482 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU.
3. DIM Nomor 6486 disetujui penambahan frasa “ ... yang diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah”.
4. DIM Nomor 6487, 6488, 6489, 6490 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU.
5. DIM Nomor 6490 dan 6491 disetujui untuk dihapus, tetapi apabila Pemerintah dapat mengajukan peruntukan kawasan lainnya maka DIM ini dapat dimunculkan kembali.
6. DIM Nomor 6493 disetujui untuk dipending (memberi kesempatan kepada internal Pemerintah untuk berkoordinasi) menyesuaikan dengan kesepakatan DIM 6461 s.d 6465.
7. DIM Nomor 6498, 6499, 6500, 6501, 6505 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU.
8. DIM Nomor 6509, 6510, 6512, 6514, 6515, 6516, 6517, 6518, 6519 disetujui untuk dibahas dalam Timus/Timsin dengan penyesuaian penempatan Pasal 19A (relokasi).
9. DIM Nomor 6521, 6522, 6528 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU.
10. DIM Nomor 6532 dan 6533 disetujui reformulasi rumusan dan terdapat usulan tambahan dari Pemerintah yang akan dibicarakan nanti, rumusannya “ terkait nilai yang sudah ditetapkan lembaga penilai bersifat final dan mengikat”.
11. DIM Nomor 6542 dan 6552, disetujui pembahasannya untuk dipending (terkait ganti rugi).
12. DIM Nomor 6555, 6558, 6560, dan DIM Nomor 6562 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU.

III. PENUTUP

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab VIII – Pengadaan Lahan Pasal 120 s.d. Pasal 139 diskors pukul 21.32 dan dilanjutkan hari Rabu, tanggal 16 September 2020 pukul 10.00 WIB.

Jakarta, 15 September 2020
A.N. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,



WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP.19670127 199803 1 001